

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA
PEKANBARU (STUDI KASUS DI KELURAHAN SRI MERANTI
KECAMATAN RUMBAI)**

Oleh :

Desvita Nindya Wulandari

(e-mail: wulandaridesvita@yahoo.com)

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Family Expectation Program is Conditional Cash Transfer program to accelerate poverty alleviation and development of the social security system provided to RTSM/KSM in an effort to improve human resources especially in education and health. Implementation of The Family Expectation Program in Pekanbaru began in 2013 to include 8 sub-districts, one of it is Rumbai. According to directly observation, the problem is implementation of The Family Expectation Program in Rumbai Sub-district is not optimal, especially in Sri Meranti Village. The purpose of this research is to knowing how the implementation of The Family Expectation Program in Sri Meranti Village Rumbai Sub-district and to knowing the obstacle factor implementation of The Family Expectation Program in Sri Meranti Village Sub-district Rumbai.

The theory used is management by George R. Terry starting from planning, organizing, actuating and controlling. This research uses a qualitative descriptive method. In collecting the data researcher uses the method of observation, interview and documentation.

The result of this research gets conclusion that implementation of The Family Expectation Program in Pekanbaru is not optimal. There is still a shortage especially in planning and organizing implementation of The Family Expectation Program. And then, the obstacle factor in implementation of The Family Expectation Program in Pekanbaru (the case studies in Sri Meranti Village Rumbai Sub-district), that is socialization, budgetting, completeness requirement and lack of awareness RTSM/KSM.

Keywords: The Family Expectation Program, Health, Education, Poverty

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia menurut merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Di Indonesia, masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks, hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara yang berkembang dan mengalami pertambahan penduduk yang melonjak setiap tahunnya. Maka, tingkat kesejahteraan penduduknya pun masih jauh di bawah negara-negara maju, seperti Amerika dan Jerman.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari segi kuantitas atau jumlah masyarakat, baik di desa maupun di kota.

Penduduk miskin digambarkan dengan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, meliputi sandang, pangan, dan papan. Pendapatan yang kurang pun menjadi hal yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Penduduk miskin pun memiliki kualitas hidup yang rendah. Sehingga, penduduk miskin sulit untuk mengakses layanan kesehatan memadai, mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sulit bagi mereka untuk dapat mengubah nasibnya dari kondisi miskin menuju kondisi yang lebih baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain terutama dari pihak pemerintah.

Untuk Kota Pekanbaru pada tahun 2014 terdapat 324.000 jiwa

penduduk yang tergolong miskin dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 327.000 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 975.304 jiwa, yaitu 33,5% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru merupakan penduduk miskin.

Maka dari itu setidaknya pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dari segi ekonomi, tempat tinggal dan pendidikan, maka dari itu Pemerintah Pekanbaru menjalankan program penanggulangan kemiskinan baik program pusat maupun daerah yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial dengan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Disahkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan landasan hukum terhadap kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mengenai jaminan sosial. Jaminan Sosial yang dimaksud adalah UU SJSN adalah perlindungan sosial untuk menjamin bagi seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan meningkatkan martabat hidupnya. Selanjutnya, sebagai penyempurna dari UU SJSN 2004, dikeluarkanlah Keputusan

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan”.

Kebijakan Pemerintah untuk mengeluarkan apa yang dinamakan PKH adalah untuk membantu masyarakat yang berada dalam kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM). PKH di Kota Pekanbaru dijalankan sejak tahun 2013 tapi kenyataannya sampai pada tahun 2015 pelaksanaa PKH di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Sri Meranti Kecamatan Rumbai) belum optimal karena dilihat masih banyaknya RTSM pada tahun 2015 yakni 3.258 yang mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya berjumlah 1.662 RTSM.

RTSM penerima bantuan PKH seharusnya adalah golongan rumah tangga sangat miskin tapi pada kenyataannya masih terdapatnya keluarga dengan perekonomian yang layak yang mendapatkan program ini yakni berjumlah 27 rumah tangga pada tahun 2015.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai). Harapan peneliti nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan pelaksanaan PKH.

TINJUAN PUSTAKA

1.1 Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berrati mengatur (mengelola), **Wilujeng (2007:2)**.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu, Melayu S.P Hasibuan dalam **Marnis (2008:3)**.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan operasional atau maksud-maksud yang nyata, **Brantas (2009:4)**.

Atmosudirjo (2004:56), menyatakan bahwa manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan dengan mengakumulasikan pengetahuan yang sistematika atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir, **Siswanto (2006:7)**.

Manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama, Haiman dalam **Manullang (2001:3)**.

Adapun menurut **Kasim (2005:5)**, pemanfaatan utama manajemen adalah untuk mengelola program kerja melalui proses perencanaan, pengawasan atau pelaksanaan, atau pelaksanaan ulang agar tujuan program tersebut dapat tercapai.

Terry (2006:4) berpendapat, *“management is a distinct process consisting of planning, organizing,*

actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by use of human being and other resources”, artinya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Menurut James A. F. Stoner dalam **Handoko (2001:8)**, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Pengendalian dan pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana, **Hasibuan (2004:41)**.

1.2 Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata program artinya rancangan mengenai azas serta usaha yang dilaksanakan.

Program dapat dikatakan sebagai sebuah rencana yang didalamnya mencakup sejumlah usaha yang ingin dilakukan walaupun tidak semuanya bisa direalisasikan. Sebuah program besar dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sedangkan **Ria Dina dalam Sri Kadarini (2011:16)** mengatakan bahwa program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menggambarkan dan menganalisis program terdapat bagian-bagian pokok yang harus ada, yaitu : masukan, komponen, implementasi kerja di lapangan.

Menurut Sujianto (2008:32) program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Dalam menggambarkan dan menganalisis program terdapat bagian-bagian pokok yang harus ada, yaitu : inputs, komponen, implementasi kerja di lapangan, bentuk-bentuk hubungan antar lini,

outcomes (Muhammad Afrizal dalam Wirawan, 2012:26)

1.3 Kemiskinan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang harus diprioritaskan adalah usaha yang lebih optimal dalam penanganannya, yang lebih penting lagi sesuai dengan UUD 1945 yang tertera di dalamnya dengan kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem perekonomian kita yang berbunyi: Perekonomian telah ditetapkan atas dasar-dasar itu supaya diupayakan untuk pengentasan kemiskinan.

Supriatna (2000:196) kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah.

Menurut **Sudantoko (2009:43-46)** definisi kemiskinan atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan structural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolute ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum.

Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang.

Specker dalam Darwin (2005:3) menyatakan kemiskinan mencakup (1) kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, (2) gangguan dan tingginya resiko kesehatan, (3) resiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, (4) kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak, dan (5) kekurangan dalam kehidupan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

Stamboel (2012:18) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang mendunia, setiap orang memiliki karakteristik kemiskinannya masing-masing yang diakibatkan oleh begitu banyak sebab seperti geografis, kultur, system, pemerintahan dan lain-lain. Kemiskinan adalah hilangnya hak asasi manusia. Frustrasi permusuhan dan kemarahan yang muncul dari kesengsaraan kemiskinan mustahil menjaga perdamaian dimasyarakat manapun (**Yunus, 2008:251**).

METODE PENELITIAN

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data skunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. data-data yang diperoleh akan di bahas secara menyeluruh dengan dibandingkan konsep teori-teori yang mendukung

pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai)

Manajemen adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru, dibutuhkan adanya fungsi manajemen, yakni :

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya yang dilakukan dalam perencanaan adalah merencanakan sasaran program dan cara yang tepat dalam pelaksanaan PKH agar berjalan dengan optimal sehingga program ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekanbaru.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah (organisasi) yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Pengorganisasian yang optimal merupakan suatu integritas dari hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya. Secara garis besar penempatan pegawai (*staffing*)

dan koordinasi merupakan poin penting dalam pembentukan kinerja pegawai.

Dimulai dari penerimaan tenaga kerja berdasarkan kompetensi, sehingga pelaksanaan tugas dan hasil yang optimal dapat dicapai. Penempatan pegawai (*staffing*) UPPKH yang tepat sesuai dengan bidangnya akan membuat proses pengelolaan berjalan dengan baik, dikarenakan pegawai yang ditempatkan memahami tugas yang akan dikerjakan.

Koordinasi berfungsi untuk menjamin kelancaran prosedur kerja dari beberapa satuan kerja yang merupakan komponen atau bagian dari organisasi secara keseluruhan, yang masing-masing menjalankan sebagian dari tugas dan fungsi sebagai akibat dari sosialisasi dan fungsionalisasi. Dengan koordinasi dimaksudkan agar tercapai kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, mencegah adanya kesimpangsiuran atau pertentangan, kekembaran, tumpang tindih (*overlapping*), kesenjangan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan serta meningkatkan efisiensi. Untuk pencapaian tujuan pelaksanaan PKH di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang maksimal, diharapkan pihak UPPKH dapat berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga penyaluran pemberian bantuan ini dapat terlaksana tepat waktu.

3. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan merupakan suatu kegiatan memimpin, memilih dan memberikan arahan dan penilaian terhadap para pekerja sehingga mereka akan bekerja secara baik untuk mencapai rencana. Pengarahan dalam pelaksanaan PKH ini meliputi

pemberian arahan dari Koordinator PKH Kota Pekanbaru kepada seluruh Operator PKH dan Pendamping Kecamatan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan PKH dan kemudian membuat perencanaan baru untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai)

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyampaian informasi tentang suatu kebijakan dalam implementasi. Dalam sosialisasi ini implementer akan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan, seperti: latar belakang mengapa kebijakan dibuat, tujuan kebijakan, siapa yang berhak untuk mendapatkan manfaat kebijakan, apa bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan agar tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai, apa saja bentuk pelayanan ataupun bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah melalui implementasi kebijakan tersebut agar kelompok sasaran memperoleh manfaat dari implementasi kebijakan, bagaimana kelompok sasaran terlibat

dalam melakukan monitoring untuk mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan, dan lain-lain.

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan PKH. Sosialisasi dilakukan dengan tatap muka antara Pendamping PKH dan para stakeholder di tingkat bawah maupun RTSM peserta PKH.

2. Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan adalah keuangan yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan pada masyarakat juga terbatas.

Dari hasil observasi di lapangan bahwa dalam pelaksanaan PKH ini kurang mendapatkan dukungan berupa sumber daya anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga sulit untuk memberikan bimbingan kepada pendamping.

3. Kelengkapan Syarat

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial pastinya tidak terlepas dari adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk proses pengambilan bantuan, begitu juga dengan PKH. Namun masih banyak dari RTSM peserta PKH di Kelurahan Sri Meranti yang tidak mempunyai KTP dan KK setempat, ini menyulitkan proses pengambilan bantuan karena mereka harus mengurus surat domisili dari RT, RW dan Lurah setempat.

4. Kurangnya Kesadaran RTSM/KSM

Kurangnya kesadaran RTSM/KSM menyebabkan

pelaksanaan PKH di Kelurahan Sri Meranti kurang maksimal. Dalam pelaksanaan PKH dibutuhkan kesadaran RTSM/KSM untuk dapat aktif dalam pelaksanaan program ini tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk aktif.

Dalam pelaksanaan PKH, kesadaran RTSM/KSM merupakan faktor yang sangat penting, karena kurangnya kesadaran dari RTSM/KSM menjadi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan PKH tidak maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya perencanaan yang belum optimal dilihat dari masih terdapat rumah tangga yang tergolong mampu tetapi menerima bantuan PKH di Kelurahan Sri Meranti yang ditujukan untuk rumah tangga miskin dalam hal ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Hal ini dikarenakan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) merupakan data yang diambil BPS pada tahun 2011. Selain itu, pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai) juga masih terdapat lemahnya koordinasi dalam hal penyaluran bantuan PKH sehingga pencairan bantuan sering mengalami keterlambatan. Tujuan pencairan bantuan adalah membantu RTSM dalam hal pembiayaan baik dalam bidang pendidikan,

agar keberlangsungan anak mereka sekolah dan menerima kebutuhan gizi bisa terpenuhi. Pelaksanaan pembayaran yang seharusnya dibayarkan pada bulan terakhir periode caturwulan, ternyata di lapangan dilakukan pada periode caturwulan berikutnya. Bisa diambil kesimpulan bahwa, tahapan pencairan bantuan tidak berjalan efektif dari apa yang seharusnya dilakukan.

2. Belum optimalnya pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai) dikarenakan masih terdapatnya faktor penghambat yakni kurangnya sosialisasi terhadap SKPD ditingkat kelurahan, anggaran dalam hal pembiayaan diklat Pendamping PKH, kelengkapan syarat RTSM/KSM untuk pengambilan bantuan, dan kurangnya kesadaran RTSM/KSM dalam memenuhi komitmen dan menghadiri pertemuan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA.

- Atmosudirjo, Prajudi. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global*. Bandung: PT. Intan Perkasa
- Brantas. 2009. *Mengenal Manajemen Organisasi*. Jakarta: Yudistira
- Darwin, M.M. 2005. *Negara dan Perempuan – Reorientasi*

- Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana
- _____. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Gonner, Christian, Ade Cahyat, Michaela Haug. 2007. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga*. Bogor Barat: Center for International Forestry Research
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, S.P Melayu. 2004. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kasim, Iskandar. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Lexy J, Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Manullang .2001. *Manajemen Personalia* Edisi 3. Yogyakarta: BPFE
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Press
- Namawi, Ismail. 2007. *Public Policy*. Surabaya: Pmn
- Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). 2013. Direktorat Jaminan Sosial. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kementrian Sosial.
- Siswanto, H. B. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: BumiAksara
- Stamboel, Kemal Azis. 2012. *Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sudantoko, Djoko. 2009. *Dasar-dasar Pangantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. PP Mardi Mulyo
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

- _____. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik "Konsep, Teori dan Praktik"*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sulekale, Dalle Daniel. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah dalam Artikel Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*. 2003
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supriatna, Thahja. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineke Cipta
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT. ALUMNI
- Todaro, Michael dan Smith, Stephen. 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Wilujeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yunus, Muhammad. 2008. *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kota*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama